

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR**



**ANALISIS DAMPAK PENGELUARAN PUBLIK DAN EFISIENSI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

KETUA PENELITI

FAISOL, S.Pd., M.M.
NIDN: 0712046903

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
OKTOBER 2018

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktoral Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 059/SP2H/LT/KM/2018, Tanggal 26 Pebruari 2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : ANALISIS DAMPAK EFISIENSI PENGELUARAN
PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN KEMISKINAN DI PULAU JAWA

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : FAISOL, S.Pd, M.M
Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri
NIDN : 0712046903
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 08125933217
Alamat surel (e-mail) : faisolkdr@gmail.com

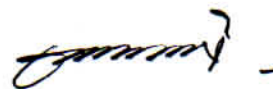
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 50,000,000

Mengetahui,
Ketua LPPM



(Dr. SURYANTO, M.Si)
NIP/NIK 196505101990031

Kota Kediri, 26 - 10 - 2018
Ketua,



(FAISOL, S.Pd, M.M)
NIP/NIK 0712046903

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. SUBAGYO)
NIP/NIK 0717066601

RINGKASAN

Perdebatan tentang keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi dan outcome-nya memiliki sejarah panjang sejak era Keynesian dan Neo Klasik. Keterlibatan ini diperbincangkan oleh ekonomi pasar. Ada anggapan bahwa pasar adalah tidak sempurna, sehingga keterlibatan pemerintah diperlukan untuk meminimalkan distorsi yang dihasilkan dari pasar. Tujuan dari menggantikan sistem ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi, dan kemudian pertumbuhan ekonomi. Namun, ada pendapat bahwa keterlibatan pemerintah dapat mengakibatkan inefisiensi daripada efisiensi dalam alokasi sumber daya. Dalam banyak kasus, peningkatan pengeluaran pemerintah di negara berkembang menyebabkan crowding out pada investasi swasta. Akibatnya seluruh proses memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Terlepas dari semua perdebatan ini, argument terkait bahwa apakah pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi dasar pemikiran yang diterima di sebagian besar perekonomian di beberapa negara. Melalui hipotesis ini, agar pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi yang maksimum sangat penting dalam alokasi sumber daya. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi cenderung bervariasi dan variasi ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi. Kinerja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih signifikan ketika pemerintah memajukan akuntabilitasnya. Pengeluaran pemerintah adalah input yang membutuhkan efisiensi yang maksimum dalam alokasi agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemaksimalan pertumbuhan membutuhkan perhatian besar secara simultan pada belanja pemerintah dan tingkat efisiensi pemerintah dalam alokasi sumber daya.

Tujuan paper ini adalah untuk menguji dampak pengeluaran publik dan efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder tentang belanja publik (yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan), pembentukan modal tetap bruto, inflasi, pertumbuhan penduduk, dan produk domestik regional bruto per kapita yang diperoleh dari publikasi Biro Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Otonom di Kementerian Keuangan (DJPK). Metode analisis dilakukan dengan teknik data panel dengan Fixed Effect Model diterapkan pada sampel penelitian 73 kabupaten/kota di Jawa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja publik mempercepat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia. Hasilnya juga menunjukkan ketika pembelanjaan publik berinteraksi dengan efisiensi pemerintah, hasilnya tidak menemukan bukti yang positif bahwa efisiensi pemerintah untuk mendorong dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil ini, pembuat kebijakan fiskal kabupaten/kota di Jawa Indonesia harus mempertimbangkan lebih lagi dalam menggunakan pengeluarannya agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Penelitian Disertasi Doktor (PDD) dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Laporan akhir penelitian ini dilaksanakan di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penelitian sudah berlangsung selama kurang lebih satu (1) tahun dan diakhiri pada bulan Oktober 2018.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalam nya kepada berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini:

1. DRPM Kemenristek DIKTI yang telah memberikan bantuan dana kepada kami untuk melaksanakan penelitian
2. Bapak Dr. Suryanto, sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri atas dukungannya yang diberikan.
3. Berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan akhir penelitian, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk dan isi laporan agar kedepannya dapat belih baik.

Harapan kami, semoga laporan Penelitian Disertasi Doctor ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca.

Kediri, 26 Oktober 2018

Ketua Peneliti

FAISOL, S.Pd., M.M.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Kemajuan Luaran yang ditargetkan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah dan Tinjauan Literatur	12
2.2. Konsep Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Publik	15
2.3. Pengeluaran Publik dan Pertumbuhan Ekonomi	16
2.4. Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi	17
2.5. Pengukuran Efisiensi pendekatan SFA.....	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
3.1. Tujuan Penelitian.....	21
3.2. Manfaat Penelitian	21
BAB IV METODE PENELITIAN	23
4.1. Tahapan-tahapan Penelitian	23
4.2. Konsep Penelitian	24
4.3. Objek Penelitian	24
4.4. Sumber Data dan Deskripsi Variabel Penelitian	24

4.5. Metode Analisis	25
4.6. Spesifikasi Model Penelitian	26
4.6.1 Model Satu (1)	26
4.6.2 Model Dua (2)	27
 BAB V HASIL YANG DICAPAI.....	 29
5.1. Pemilihan Model	29
5.2. Hasil Fixed Effect Model	30
5.2.1. Dampak pengeluaran public terhadap pertumbuhan ekonomi	31
5.2.2. Dampak efisiensi terdapatap pertumbuhan ekonomi	31
5.2.3. Dampak variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi	31
 BAB VI RENCANA TAHAPAAAN BERIKUTNYA	 33
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	34
7.1 Kesimpulan	34
7.2. Implikasi	34
 DAFTAR PUSTAKA.....	 36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Luaran Penelitian.....	11
Tabel 4.1	: Hasil Chow Test dalam pemilihan model	29
Tabel 4.2	: Hasil Hausman Test.....	29
Tabel 4.3	: Conclusion Model Selection	30
Tabel 4.4	: Hasil Analisis Fixed Effect Model (Model I dan Model II).....	30
Tabel 6.1	: Rincian dan Tahapan Kegiatan Penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Perkembangan Anggaran Nasional dari 3 sektor utama	5
Gambar 1.2	: Pertumbuhan PDB	5
Gambar 1.3	: Hubungan Anggaran Publik dan Pertumbuhan Ekonomi	7
Gambar 1.4	: Hubungan Anggaran Publik an Pertumbuhan Ekonomi	8
Gambar 2.1	: Hubungan Efisiensi dan Efektifitas	16
Gambar 2.2	: Efisiensi berorientasi Output	20
Gambar 4.1	: Konsep Penelitian.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Artikel Ilmiah di publikasikan di Prosiding dalam Seminar Internasional
- Lampiran 2 : Sertifikat Pemakalah dalam Seminar Internasional
- Lampiran 3 : Draft Jurnal yang di submit di Journal of Applied Economic Science ISSN: 18436110 H Index 7 dengan Indeks Scopus Q3 coverage on going.
Publisher: ASERS
- Lampiran 4 : Jurnal yang akan dipublikasi di Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol (4) 1 Maret 2019. Jurnal sudah terakreditasi Kemenristek DIkti Sinta 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Evaluasi efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah masih menjadi kunci pembahasan politik dan akademis, dalam literatur sektor publik, dan bahkan lebih, yaitu di literatur administrasi dan manajemen publik. Pengukuran dan perbedaan kinerja ekonomi di setiap tingkat pemerintahan tetap menjadi persoalan yang relevan dalam agenda saat ini, menjadi tema berulang selama evolusi pengelolaan sektor publik di sepanjang tiga fase yang berbeda (Osborne, 2006) (Inverno, Carosi, & Ravagli, 2017)

Yang pertama, di sebagian besar negara Eropa, mulai dari akhir abad 19 sampai akhir 1970an / awal 1980an; telah memenuhi semua kebutuhan sosial dan ekonomi warganya. Administrasi, birokrasi, dan penyediaan layanan publik mencirikan aktivitas administrasi publik pada periode tersebut. *Tahap kedua* dapat dikaitkan dengan paradigma "New Public Management (NPM)" (Hood C, 1991). Di era itu, pasar, manajerial, kontrol masukan dan keluaran, dan evaluasi kinerja telah mendapat pijakan dalam administrasi publik (Owen EH, 2003); Baik pembahasan teoritis maupun politik menghadapi keharusan untuk menggabungkan ketentuan layanan publik dengan pengeluaran publik. Jadi, sejak awal tahun 1990an, efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan telah menjadi kata kunci pengelolaan sektor publik (OECD, 1998). *Ketiga*, di akhir tahun 1990an, yaitu paradigma manajemen publik telah banyak dikritik dan banyak bukti empiris menggaris bawahi kegagalannya (Dunleavy, Margetts, Bastow, & Tinkler, 2006) (Osborne, 2006). Kemudian, (Ferreira & Marques, 2014) menjelaskan juga bahwa evaluasi kinerja masih dianggap sebagai alat kunci dan sesuatu yang penting untuk keputusan pembuat kebijakan. Penyediaan pengukuran efisiensi yang kuat dan penerapan sistem insentif yang efektif ada dalam agenda politisi dan akademisi.

Selanjutnya (Hauer, Kyobe, & Fund, 2010) juga menyatakan bahwa efektifitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah telah menjadi salah satu isu utama dalam keuangan publik. Di negara maju, dan banyak negara-negara transisi, efisiensi yang tinggi dari belanja tampaknya menjadi satu-satunya metode untuk menghindari peningkatan besarnya beban pajak. Selain itu, pemerintahan yang baik juga menjadi perhatian lebih umum, seperti yang telah ditunjukkan, misalnya, Easterly dan Levine (1997) menyatakan bahwa itu adalah penentu penting dari pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir globalisasi lebih jauh telah mengangkat tekanan publik pada alokasi sumber daya yang efisien, sebab globalisasi menciptakan lingkungan yang lebih efektif dengan cost yang relatif lebih sedikit untuk arus modal (Afonso, Schuknecht, & Tanzi, 2005). Selanjutnya, praktek pemerintah di Asia Timur juga mendapat perhatian yang cukup besar dari investor asing, terutama dengan ASEAN-China Free Trade Area yang sepenuhnya sudah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Konsekuensinya, praktik belanja publik lebih transparan diperlukan dari pemerintah sebab efisiensi dan efektifitas belanja publik memainkan peran kunci dalam kesuksesan ekonomi dan stabilitas suatu negara (Tanzi dan Schuknecht, 2000; Heller, 2003).

Afonso et al (2005) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah telah menarik banyak perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pembayar pajak. Hal ini terkait erat dengan peran pemerintah sebagai pengelola anggaran dan implikasi pengeluaran pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi. Kini fokus perhatian tentang peran pemerintah tersebut telah bergeser ke arah penilaian empiris dari efisiensi dan efektifitas kegiatan sektor publik. Dalam konteks makro ekonomi, pengeluaran pemerintah (*governmet expenditure*) merupakan salah satu variable pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi swasta dan net ekspor. Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah didalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*).

Padangan teori ekonomi tersebut diyakini bahwa pengeluaran publik merupakan sarana intervensi pemerintah dalam perekonomian yang dinilai paling efektif. Selama ini, efektifitas belanja pemerintah diukur dengan berapa besar pertumbuhan ekonomi. Dengan berhasilnya kelayakan pembangunan ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat kenaikan pendapatan, atau penekanan angka kemiskinan. Dalam kajian model pertumbuhan ekonomi seperti teori pertumbuhan baru oleh aliran pemikiran Keynesian, Hukum Wagner (1883, 1890) dan model pertumbuhan endogen Barro (1990). Hukum Wagner (1883, 1890) menyoroti bahwa ada hubungan kausal antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini dengan jelas menyatakan peran belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan alasan bahwa keberadaan pemerintah sangat penting untuk mengelola dan membiayai monopoli alam dan untuk perluasan pengeluaran budaya

dan kesejahteraan. Beberapa studi empiris meneliti kelayakan hukum Wagner (1883, 1890). Antara lain Romer (1986), Lucas (1988), Grossman dan Helpman (1989), Barro (1990), Futagami et al. (1993), Fisher dan Turnovsky (1998) dan Chen (2003).

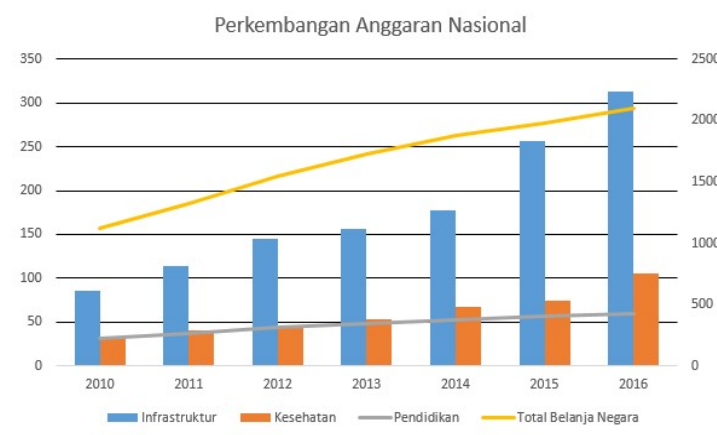
Lucas (1988) berpendapat bahwa pengeluaran publik di bidang pendidikan meningkatkan tingkat modal manusia, yang berkontribusi pada ekonomi berbasis pengetahuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama dilakukan oleh Zagler dan Durnecker (2003) dalam studinya mengemukakan bahwa instrumen kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, infrastruktur publik, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan memiliki efek jangka panjang pada perekonomian suatu negara. Selanjutnya, Barro (1990) dalam model pertumbuhan endogennya menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberi kontribusi positif terhadap tingkat pertumbuhan jangka panjang. Dia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua komponen utama, yaitu belanja produktif dan belanja yang tidak produktif. Belanja produktif di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, sistem komunikasi dan penelitian meningkatkan produktivitas bangsa dan karenanya merangsang potensi output dalam perekonomian. Argumen ini mendukung teori pertumbuhan baru Keynesian. Pandangan Keynesian menegaskan bahwa tingginya tingkat pengeluaran pemerintah di sektor produktif berkontribusi pada pekerjaan, profitabilitas dan investasi yang lebih tinggi, dan karenanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pandangan Keynesian juga mendukung peran pemerintah untuk menstabilkan ekonomi selama siklus fluktuasi.

Chude (2013) dalam studinya mengungkap tentang makroekonomi Keynesian tradisional, yaitu banyak jenis pengeluaran publik, dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect pada permintaan agregat. Dari pemikiran Keynesian, belanja publik dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena, meningkatnya konsumsi pemerintah cenderung mengarah pada peningkatan lapangan kerja, profitabilitas dan investasi melalui multiplier effect pada permintaan agregat. Akibatnya, pengeluaran pemerintah menambah permintaan agregat, yang memprovokasi peningkatan output tergantung pada pengganda pengeluaran. Sebagaimana penelitiannya Gemmell (2014) menemukan hubungan positif jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan Fan, et al (2004) menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sektor pertanian, pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan

kemiskinan. Lebih lanjut, Fan menegaskan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap sektor pertanian, pendidikan, dan jalan infrastruktur. Hasil penelitian itu seirama dengan yang dilakukan oleh Greiner (2006) menyatakan bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi saat investasi pemerintah tidak optimal. Untuk itu investasi pada pembangunan modal manusia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jika dilakukan dengan efektif dan efisien. Beberapa studi mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berasumsi bahwa implikasi semua pengeluaran investasi pemerintah adalah produktif (Barro, 1990; Grossman, 1988; Al Fawwaz T M. 2012; Abu Eideh, 2015; Gemmell, 2014; Olulu et al, 2014 dan Fan, et al, 2004).

Di Indonesia, Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung lebih dari lima belas tahun, belum mampu mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah. Penerbitan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Nomor 32 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan otonomi daerah. Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan daya saing pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari sebuah wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta menunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah sebagaimana tercermin pada anggaran publik yaitu urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terus meningkat signifikan, (Gambar 1.1.), namun peningkatan anggaran tersebut tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan ekonominya.

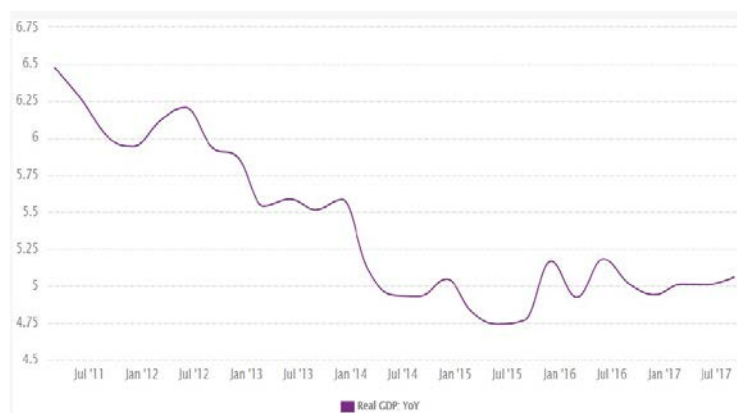


Gambar 1.1.
Perkembangan Anggaran Nasional dan ketiga sektor dasar
Tahun 2010-2016

Sumber: Kemenkeu, 2016

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan anggaran pemerintah dan alokasi anggaran dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang meningkat sangat signifikan. Semestinya, peningkatan anggaran belanja tersebut dapat memberikan dampak multiplier effect bagi percepatan pencapaian kualitas layanan publik yang mendorong pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana yang dinyatakan para ekonom bahwa kenaikan belanja pemerintah menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, fakta menunjukkan tidak seperti yang diharapkan bahwa keterlibatan pemerintah melalui pengeluaran publik belum menghasilkan pertumbuhan yang diharapkan. Hal tersebut tercermin pada lambannya laju pertumbuhan ekonomi nasional (ceicdata.com, 2017)



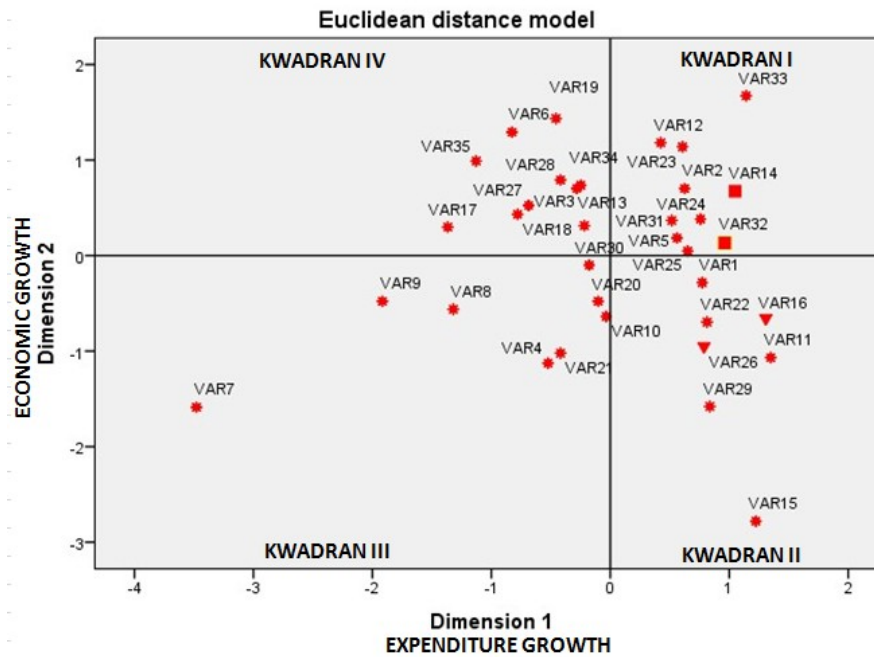
Gambar 1.2
Pertumbuhan PDB riil Tahun 2011-2017

Sumber: www.ceicdata.com

Gambar 1.2 menggambarkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2011-2017 bergerak lambat berbanding terbalik dengan perkembangan anggaran pemerintah yang terus meningkat signifikan. Hal tersebut mencerminkan efektivitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang kurang optimal.

Fenomena tersebut terjadi juga di pemerintahan pada tingkat kabupaten/kota di pulau Jawa khususnya, data menunjukkan adanya hubungan negatif dan positif antara pertumbuhan anggaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Jika perkembangan PDRB dikaitkan dengan perkembangan besarnya APBD Kabupaten/Kota, maka indikasi adanya ketidak efisienan peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dapat dideteksi, yaitu ketika pertumbuhan APBD Kabupaten/Kota tinggi (diatas rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten/Kota) namun pertumbuhannya rendah (dibawah pertumbuhan rata-rata). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tingkat efektifitas yang rendah tentang peranan pemerintah melalui APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.3 mengindikasikan bahwa pada tahun 2014 – 2015 menggambarkan adanya banyak Kabupaten/Kota yang berada di kwadran II, dimana mencerminkan tingkat peranan pemerintah Kabupaten/Kota yang kurang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketidakefektifan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya perilaku-perilaku yang mengutamakan nilai-nilai individualis, *self interest* ketimbang nilai-nilai lain (local) ketika membuat kebijakan anggaran. Hampir sejalan dengan Kabupaten/Kota yang berada di kwadran II, pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di kwadran III juga mengindikasikan adanya pengelolaan anggaran belanja yang kurang efisien. Alasannya, kontribusi APBD kurang efektif sebagai stimulus pertumbuhan ekonominya. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kwadran II dan III dapat meningkatkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonominya dengan menekan perilaku melayani diri sendiri, *self interest*, bagi pembuat kebijakan yang kemudian dapat mendorong tingkat efisiensi pengelolaan APBD-nya. Gambaran tersebut diatas mengindikasikan bahwa keeratan hubungan antara peranan pemerintah daerah dengan aktivitas ekonomi sangat ditentukan oleh adanya factor lain, yaitu perilaku korupsi yang menciptakan tingkat efisiensi anggaran belanja pada masing-masing tingkat pemerintah daerah.

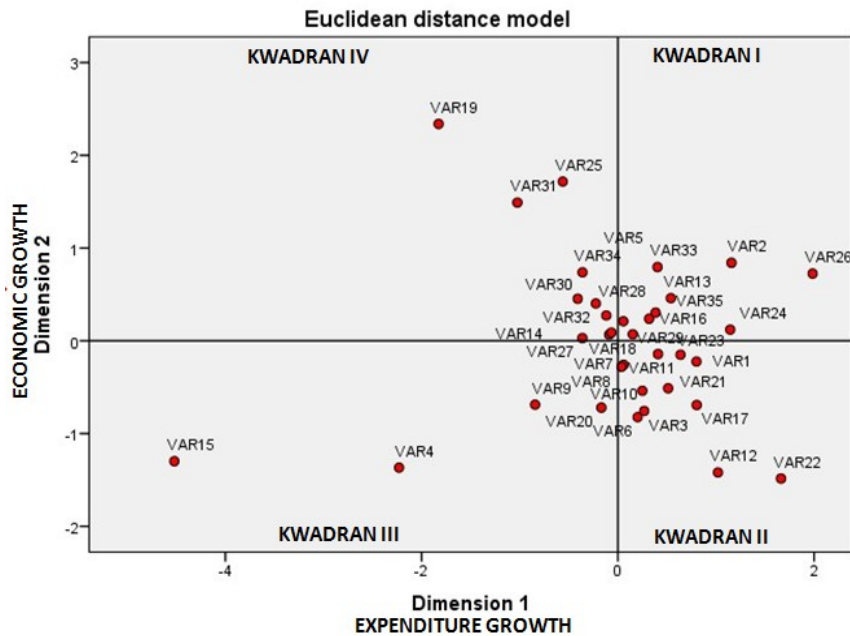


Gambar 1.3
 Hubungan pertumbuhan anggaran pemerintah
 Dan pertumbuhan ekonomi Tahun 2014-2015
 Sumber: BPS, (2017)

Sebaliknya, pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kwadran I mengindikasikan peran pemerintah daerah yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya, terutama untuk Kabupaten/Kota yang peran swastanya tidak terlalu dominan, seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang. Kemungkinan karena peran swasta juga signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya disamping peran pemerintah daerahnya. Selanjutnya, Kabupaten/Kota yang berada di kwadran IV mengindikasikan peran swasta yang lebih dominan dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dengan kesadaran, betapa sangat penting penekanan perilaku-perilaku seperti individualis, rent seeking, atau perilaku oportunistik bagi pejabat pemerintah dapat menciptakan tingkat efisiensi belanja publik menjadi kesepakatan, sehingga setiap melakukan kebijakan anggaran, pemerintah selalu menyertakan aspek efisiensi anggaran publik sebagai target kebijakan.

Pada dasarnya, menekan perilaku sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat menciptakan tingkat efisiensi pengelolaan APBD. Hal itu dapat digunakan sebagai strategi peningkatan peran pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini

dapat dicermati ketika terjadi perubahan perilaku dalam pengelolaan APBD untuk Tahun 2016-2017 (Gambar 1.4)



Gambar 1.4
 Hubungan pertumbuhan anggaran pemerintah dengan
 Pertumbuhan ekonomi Tahun 2016-2017
 Sumber: BPS, (2017)

Gambar 1.4 mengindikasikan adanya pergeseran yang cukup signifikan tentang peranan pemerintah daerah dalam menstimulus pertumbuhannya. Pemerintah Kota Tegal, misalnya, mengindikasikan adanya turunnya tingkat korupsi yang akhirnya mendorong peningkatan efisiensi anggaran, sehingga pertumbuhannya juga semakin tinggi, yaitu berubah dari kwadran IV berubah menjadi menjadi di posisi kwadran I. Sebaliknya, Kabupaten Kebumen dikategorikan sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya rendah, ketika pengelolaan anggarannya tidak efisien karena tingginya tindakan korupsi, yaitu berubah dari kwadran I menjadi kwadran II. Selanjutnya, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Rembang nampaknya tidak mengalami perubahan dalam pengelolaan anggarannya, sehingga kedua Kabupaten ini tetap dalam kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pergeseran daerah dari kwadran satu ke kwadran yang lain mengindikasikan adanya perubahan perilaku peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, misalnya berkurangnya perilaku oportunistik pemerintah, misalokasi anggaran atau disebut juga korupsi yang kemudian mendorong tingginya

efisiensi anggaran yang akhirnya mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menunjuk kajian empiris terkait pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti secara ekstensif dan namun hasilnya belum meyakinkan. Beberapa literature menunjukkan pengeluaran publik bisa bermanfaat atau merugikan bagi pertumbuhan ekonomi. Cashin (1995) menemukan efek positif dari belanja pemerintah terhadap sektor produktif yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 23 negara maju. Ghali (2003) juga menemukan bahwa belanja pemerintah meningkatkan efisiensi ekonomi Tunisia. Meski demikian, hasilnya menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap pembiayaan utang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dilaporkan di negara-negara Asia Timur dimana Chen (2005) mengamati bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan struktur ekonomi. Dia lebih jauh berpendapat bahwa efek dari pertumbuhan ekonomi mungkin berbeda tergantung pada pilihan optimal pemerintah. Selain itu, Alexiou (2009) mengamati bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, bantuan pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan perdagangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi tujuh negara di Eropa Timur Selatan. Ghose dan Das (2013) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari 19 negara emerging markets.

Banyak studi sebelumnya masih menunjukkan hasil yang berbeda. Di negara-negara yang kurang maju, peningkatan pengeluaran pemerintah memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (misalnya Baldacci, Hillman, dan Kojoa 2004). Studi empiris lainnya dari Gupta et al. (2005), Park, Philippopoulos, dan Vassilatos (2005) berpendapat bahwa korelasi negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonominya adalah disebabkan oleh kualitas institusi yang mendorong inefisiensi ekonomi yang lebih besar seperti peningkatan ukuran sektor public.

Abdullah dan Andra (2006) menjelaskan politisi cenderung mendukung proyek tertentu bukan karena prioritas, tetapi karena suap yang dapat diperoleh atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Penyimpangan pengelolaan keuangan dapat dimulai dari penyusunan anggaran belanja daerah. Selanjutnya, Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa perilaku penyimpangan eksekutif dalam pengusulan belanja ini di antaranya adalah: mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas,

mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam kegiatan, mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar komponen setiap kegiatan, memperbesar anggaran kegiatan yang sulit diukur hasilnya

Dengan penjelasan diatas, menunjukkan fenomena yang berbeda baik pandangan teoritis maupun empiris. Maka dalam penelitian ini perlu membangun model pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan variabel efisiensi dalam mendorong efek pengeluaran public untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Perdebatan tentang keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi dan outcome-nya memiliki sejarah panjang sejak era Keynesian dan Neo Klasik (Danu Prasetyo and Zuhdi, 2013) dan keterlibatan ini dibenarkan oleh sifat ekonomi pasar. Ada anggapan bahwa pasar adalah tidak sempurna, sehingga intervensi pemerintah diperlukan untuk meminimalkan distorsi yang dihasilkan dari kegagalan pasar. Tujuan dari menggantikan sistem ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi, dan kemudian pertumbuhan ekonomi (Danu Prasetyo and Zuhdi, 2013);(Parker & Kirkpatrick 2012) Namun, ketika memperbaiki ketidaksempurnaan pasar, pemerintah diharuskan untuk tidak menggantikan carakkerja sistem pasar bukan untuk mengganti kekurangannya (Danu Prasetyo and Zuhdi, 2013). Sementara pemerintah bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dengan menggantikan sistem kerja ekonomi. Lebih lanjut, ada pendapat bahwa intervensi pemerintah dapat mengakibatkan inefisiensi daripada efisiensi dalam alokasi sumber daya. Hal ini karena pemerintah cenderung untuk menggantikan kinerja sektor swasta melalui efek crowding-out (Danu Prasetyo and Zuhdi, 2013). Dalam banyak kasus, peningkatan pengeluaran pemerintah di negara berkembang menyebabkan crowding out pada investasi swasta. Akibatnya seluruh proses memperlambat pertumbuhan ekonomi (Chang, Huang and Yang, 2011).

Terlepas dari semua perdebatan ini, argument terkait adalah apakah pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi telah menjadi dasar pemikiran yang diterima di sebagian besar perekonomian negara di atas (Danu Prasetyo and Zuhdi, 2013). Melalui hipotesis ini, agar pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, efisiensi yang maksimum sangat

penting dalam alokasi sumber daya. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi cenderung bervariasi dan variasi ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi (Rahmayanti and Horn, 2011). Kinerja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih signifikan ketika pemerintah memajukan akuntabilitasnya (Hauner and Kyobe, 2010). Pengeluaran pemerintah adalah input yang membutuhkan efisiensi yang maksimum dalam alokasi agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Therkildsen, 2010). Oleh karena itu, pemaksimalan pertumbuhan membutuhkan perhatian besar secara simultan pada belanja pemerintah dan tingkat efisiensi pemerintah dalam alokasi sumber daya.

Konsekwensi dari bermacam-macam asumsi di atas, maka dianggap sangat perlu untuk menyusun 2 perumusan permasalahan, yaitu *pertama*, apakah peningkatan belanja publik mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Indonesia. *Kedua* adalah apakah efisiensi pemerintah adalah sistem mempercepat untuk mendorong dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia, kedua; bagaimana dampak efisiensi pemerintah mendorong efek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia.

1.3. LUARAN YANG DITARGETKAN

Target luaran hasil penelitian yang hendak dicapai adalah publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi, dan luaran tambahan hasil penelitian adalah prosiding internasional, jurnal nasional terakreditasi. Capaian hasil penelitian sesuai dengan luaran yang ditargetkan dijelaskan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	
1	Artikel Ilmiah di muat di Jurnal	Internasioanl bereputasi	Submit
		Nasional Terakreditasi	Diterima
2	Artikel Ilmiah dimuat di prosiding	Internasional	Published
3	Invited speaker dalam temu ilmiah	Internasional	Sudah dilaksanakan
		Nasional	
4	HKI		Sudah diajukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah dan Tinjauan Literatur

Teori utama untuk menjelaskan efektivitas pengeluaran pemerintah mencakup hal-hal yang terkait dengan model pertumbuhan ekonomi seperti teori pertumbuhan baru oleh aliran pemikiran Keynesian, Hukum Wagner (1883, 1890) dan model pertumbuhan endogen Barro (1990).

Hukum Wagner (1883, 1890) menyoroti bahwa ada hubungan sebab akibat antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini dengan jelas menyebutkan peran belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan alasan bahwa keberadaan pemerintah sangat penting untuk mengelola dan membiayai monopoli alam dan untuk perluasan pengeluaran budaya dan kesejahteraan. Beberapa studi empiris telah menguji kelayakan hukum Wagner (1883, 1890). Antara lain Romer (1986), Lucas (1988), Grossman dan Helpman (1989), Barro (1990), Futagami et al. (1993), Fisher dan Turnovsky (1998) dan Chen (2003).

Dalam model pertumbuhan endogen Barro (1990) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberi kontribusi positif terhadap tingkat pertumbuhan jangka panjang. Dia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua komponen utama, yaitu belanja produktif dan pengeluaran yang tidak produktif. Belanja produktif di bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, sistem komunikasi dan penelitian publik meningkatkan produktivitas bangsa-bangsa dan karenanya merangsang potensi output dalam perekonomian. Argumen ini mendukung teori pertumbuhan baru Keynesian. Pandangan Keynesian menegaskan bahwa tingginya tingkat pengeluaran pemerintah di sektor produktif berkontribusi pada pekerjaan, profitabilitas dan investasi yang lebih tinggi, dan karenanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pandangan Keynesian juga mendukung peran pemerintah untuk menstabilkan ekonomi selama siklus fluktuasi. Meskipun demikian, pengeluaran yang tidak produktif seperti kesejahteraan sosial menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah diteliti secara ekstensif dan namun hasilnya tidak meyakinkan. Cashin (1995) menemukan efek positif dari belanja pemerintah terhadap sektor produktif yang meningkatkan pertumbuhan

ekonomi di 23 negara maju. Ghali (2003) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan efisiensi ekonomi Tunisia. Meski demikian, hasilnya menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap pembiayaan utang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dilaporkan di negara-negara Asia Timur dimana Chen (2005) mengamati bahwa pengeluaran pemerintah meningkatkan struktur ekonomi. Dia lebih jauh berpendapat bahwa efek dari pertumbuhan ekonomi mungkin berbeda tergantung pada pilihan optimal pemerintah. Selain itu, Alexiou (2009) mengamati bahwa pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, bantuan pembangunan, investasi swasta dan keterbukaan perdagangan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi tujuh negara di Eropa Timur Selatan. Ghose dan Das (2013) juga menemukan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dari 19 negara emerging markets.

Hasil studi sebelumnya terkait belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Jones (1990) mencatat bahwa kebijakan seperti pengeluaran kesejahteraan dan kesehatan berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Hal ini dapat dijelaskan oleh Hsieh dan Lai (1994) dalam usaha mereka untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara G7. Mereka berpendapat bahwa hubungan ini akan sangat bervariasi antar waktu dan negara. Mereka menemukan bahwa tidak ada bukti konsisten bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output per kapita negara-negara dalam studinya. Konsisten dengan Hsieh dan Lai (1994), Yongjin (2011) menemukan bahwa dampak diferensial dari pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi ada antara negara-negara maju.

Selanjutnya, ukuran pemerintah yang lebih besar memiliki dampak yang merugikan pada pertumbuhan ekonomi karena menghasilkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan hasilnya sangat kuat di negara-negara berkembang. Hasil negatif juga ditemukan oleh Hauner dan Kyobe (2008). Dengan nada yang sama, Nworji et al. (2012) juga mengamati bahwa perbedaan dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penggunaan dana. Dia menemukan bahwa belanja modal dan pengeluaran berulang pada layanan ekonomi memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal dan pengeluaran

berulang atas layanan sosial dan masyarakat dan pengeluaran berulang untuk transfer terkait positif dengan pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Aly dkk. (2006) memeriksa pengeluaran pemerintah dari berbagai sektor dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi di negara-negara GCC antara tahun 1975 dan 1995. Mereka menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan dan layanan publik lainnya produktif dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini didukung oleh Bose et al. (2007) dalam analisis mereka terhadap 30 negara berkembang. Hong dan Ahmed (2009) juga menemukan bahwa pengeluaran publik di 14 negara bagian India mengenai pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Patricia dan Izuchukwu (2013) juga mencatat bahwa total pengeluaran dalam pendidikan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hal ini juga konsisten dengan penelitian oleh Hsu (2013) terhadap 46 negara terpilih di Eropa dan Asia Tengah, di mana hasilnya menunjukkan bahwa lingkungan medis yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih tinggi dalam pendidikan menyebabkan efisiensi dan produktivitas lebih tinggi dalam ekonomi. Selain itu, ia menemukan bahwa dampak regional ada antara Eropa dan Asia Tengah

Selain itu, Rajkumar dan Swaroop (2008) menemukan bahwa perbedaan dampak belanja publik terhadap pendidikan dan kesehatan bergantung pada kualitas pemerintahan. Mereka menemukan bahwa pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan lebih mungkin berhasil di negara-negara dengan pemerintahan yang baik daripada di negara-negara dengan pemerintahan yang buruk. Demikian pula, Afonso dkk. (2006) juga menemukan peran tidak langsung indikator kelembagaan yang menguntungkan terhadap efisiensi pengeluaran sosial dan pendidikan. Selain itu, Feeny dan Rogers (2008) menemukan bahwa tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menyebabkan efisiensi pengeluaran publik yang lebih tinggi dalam mencapai hasil ekonomi seperti di bidang pendidikan dan sektor publik. Hal ini didukung oleh Cooray (2009), di mana ia menemukan bahwa baik belanja pemerintah maupun kualitas pemerintah penting bagi pertumbuhan ekonomi. Temuan serupa ditemukan oleh Nketiah-Amponsah (2009) di Ghana, di mana stabilitas politik dan demokrasi secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Plumper dan Martin (2003), yang menemukan bahwa dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di negara-negara yang lebih demokratis.

Beberapa studi lainnya terkait pengeluaran publik di sektor infrastruktur adalah Kwon (2001), Datt and Ravallion, (2002) Mussolini dan Teles, (2010), Calderon dan Serven, (2004). Sebagaimana Mussolini dan Teles (2010) menjelaskan pasokan infrastruktur merupakan komponen dorongan vital terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik untuk potensinya menghasilkan pekerjaan dan pengaruhnya di semua sektor ekonomi. Dalam hal ini, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan yang terus-menerus.

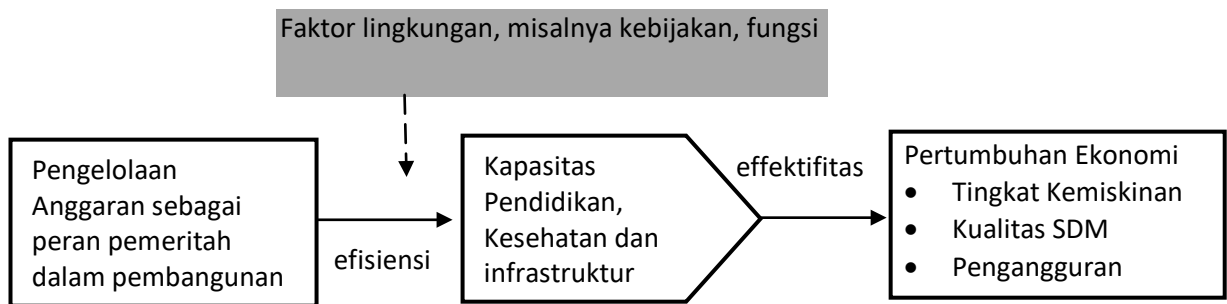
Selanjutnya di sektor pendidikan dan kesehatan yaitu Dobdinga C. Fonchamnyo dan Sama (2016), Ahmad Danu Prasetyo dan Alpha Nur Setyawan Pudjono (2013), Rahmayantia dan Theara (2011), Chan dan Karim (2012) Zagler dan Durnecker (2003) Sennoga dan Matoyu (2010), Gonand F. (2007), Sitepu dan Sinaga, (2005), Barro, (1990); Grossman, (1988); Abu Eideh, (2015); Gemmell, (2014); Olulu et al, (2014) dan Fan, et al, (2004).menunjukkan bahwa kebijakan fiskal seperti pengeluaran bidang pendidikan, infrastruktur publik, penelitian dan pengembangan dan kesehatan berdampak positif dalam jangka panjang terhadap perekonomian suatu negara.

Dalam teori pertumbuhan baru (Romer, 1986), Lucas, (1988) menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian serta pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktifitas kerjanya. Kemudian, rendahnya produktifitas tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan

2.2. Konsep Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Publik

Analisis efisiensi dan efektivitas adalah tentang hubungan antara input, output dan outcome. Pada tahun 1957, Farrell telah menyelidiki bagaimana mengukur efisiensi dan menyoroiti relevansinya bagi pembuat kebijakan ekonomi. "Penting untuk mengetahui sejauh mana industri tertentu dapat diharapkan dapat meningkatkan produksinya dengan hanya meningkatkan efisiensinya, tanpa menyerap sumber daya lebih jauh (Farrel, 1957).

Sejak saat itu teknik untuk mengukur efisiensi telah meningkat dan investigasi efisiensi menjadi lebih sering, terutama di industri. Namun demikian, pengukuran efisiensi dan efektivitas belanja publik tetap merupakan tantangan konseptual. Masalah muncul karena belanja publik memiliki banyak tujuan dan karena output sektor publik seringkali tidak dijual di pasar yang menyiratkan data harga tidak tersedia dan outputnya tidak dapat dihitung. Mandl et al (2008) mengkonsepkan tentang efisiensi dapat mendorong dampak pengeluaran terhadap tingkat perekonomian suatu Negara (Gambar 2.1.)



Sumber: Mandl et al. (2008)

Gambar 2.1
Hubungan efisiensi dan efektifitas

Gambar 2.1 menggambarkan kerangka konseptual efisiensi dan efektivitas. Ini membuat hubungan antara input, output dan outcome. Sumber moneter dan non-moneter yang digunakan (yaitu input) menghasilkan output. Misalnya, belanja pendidikan (input) mempengaruhi tingkat pencapaian pendidikan (output). Rasio input-output adalah ukuran efisiensi yang paling mendasar. Namun, dibandingkan dengan pengukuran produktivitas, konsep efisiensi menggabungkan gagasan tentang kemungkinan perbatasan produksi, yang mengindikasikan tingkat output yang layak mengingat skala operasi. Semakin besar output untuk input tertentu atau semakin rendah input untuk output yang diberikan, semakin efisien aktivitasnya. Produktifitas, sebagai perbandingan, hanyalah rasio output yang dihasilkan untuk input yang digunakan.

2.3. Pengeluaran Publik dan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa literature menunjukkan pertanyaan, Apakah peningkatan belanja pemerintah selalu mempercepat pertumbuhan ekonomi? Apakah peningkatan pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti

sumber keuangan dan efisiensi yang memfasilitasi pengeluaran itu (Riedl, 2008), (Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi, 2014), share total impor dari pengeluaran pemerintah suatu negara (Shen *et al.*, 2015), dan sistem perpajakan suatu negara (Gui-Diby 2014).

Berkaitan dengan sumber keuangan dan efisiensi alokatifnya; (Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi, 2014) dan (Riedl, 2008) lebih menekankan bahwa proses peningkatan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan pinjaman sumber keuangan dari investor swasta tidak mendorong kekuatan belanja baru dalam ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Pinjaman pemerintah dari investor swasta berakhir pada pendistribusian kembali pada pendapatan dari pada menghasilkan proyek-proyek produktif baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak didorong oleh redistribusi kekayaan antara individu di negara tersebut; melainkan didorong oleh daya beli baru. Peningkatan belanja pemerintah yang mengundang persaingan antara sektor publik dan swasta terhadap kredit yang tersedia meningkatkan tekanan di pasar kredit; hasilnya adalah meningkatnya suku bunga. Hipotesis ini didukung oleh (Gisore *et al.*, 2014) yang mengemukakan bahwa kenaikan suku bunga mengalihkan sektor swasta dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, multiplier pendapatan nasional suatu negara adalah lebih unggul ketika dibiayai oleh sumber keuangan eksternal dibandingkan dengan sumber keuangan internal. Pendanaan proyek-proyek publik dengan menggunakan sumber daya keuangan eksternal membawa sumber daya ekonomi baru dan memangkas efek crowding-out yang dihasilkan dari peningkatan pengeluaran pemerintah (Shen *et al.*, 2015).

Oleh karena itu pengeluaran pemerintah lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika sumber keuangan dijamin dari sumber eksternal dan dengan demikian agar menghindari hambatan pertumbuhan sektor swasta. Berdasarkan argumen ini, pemerintah negara berkembang harus mempertimbangkan alasan untuk mengamankan sumber keuangan eksternal dan meminimalkan pinjaman dalam negeri ketika mereka memperluas sektor publik mereka.

2.4. Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi

Masalah efisiensi pemerintah adalah salah satu isu pokok yang menjadi penting. Pertanyaan yang muncul adalah apakah efisiensi pemerintah dan dari mana asalnya?

(Kimaro, Choong and Sea, 2017). Sebelum memfokuskan hubungan antara efisiensi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, hal itu dapat menjadi prinsip untuk memiliki makna dari institusi sebagai rangkaian kesatuan yang universal dari situlah efisiensi pemerintah dimulai. Institusi adalah pengendali atau pengontrol yang diformulasikan secara manusiawi yang membentuk sinergi manusia. Bertalian dengan rekayasa fisik, institusi diakui sebagai teknologi sosial dalam proses kegiatan ekonomi produktif yang meliputi interaksi manusia dan menciptakan dorongan atau stimulus mereka (Law and Habibullah, 2006).

Dari pandangan institusional, pasar tidak dianggap sebagai eksistensi lingkungan fisik ekonomi, namun institusi sosial yang bergantung pada kemajuan atau pengembangan aturan dan norma yang akurat (Hodgson, 2016), jadi institusi adalah permainan peraturan dalam ekonomi yang mendikte interaksi antara agen ekonomi (Law and Habibullah, 2006). Lalu, bagaimana institusi menerapkan dan mempengaruhi ekonomi? Kualitas lembaga sangat penting dalam sistem ekonomi karena mereka menghasilkan sinergi ekonomi. Kualitas institusi menunjukkan standar kinerja di antara berbagai agen ekonomi. Dari ilmu atau pengetahuan bisa menuangkan pandangan yang menghasilkan melalui limpahan penyebaran teknologi, kualitas lembaga dalam kualitas peraturan pemerintah, kepercayaan hubungan yang didukung oleh kelompok ekonomi sosial-budaya serta mengintermediate organisasi supaya melakukan pasar lebih baik untuk mencapai konvergensi teknologi (Kimaro, Choong and Sea, 2017). Misalnya kualitas institusi di Korea Selatan mendorong percepatan teknologi di antara berbagai perusahaan manufaktur seperti Hyundai dan Samsung berturut-turut dengan pasokan mobil dan elektronik (Rasiah, 2011).

Hingga kini, telah menemukan bahwa efisiensi pemerintah disebabkan oleh kualitas institusi (Radaelli. Francesco, 2010). Efisiensi pemerintah, pemerintahan yang efektif dan kualitas pemerintahan digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan yang sehat yang memiliki dampak positif dalam perekonomian. (Afonso, Schuknecht and Tanzi, 2008) dalam studinya menjelaskan arti efisiensi pemerintah sebagai kemampuan pemerintah untuk menginvestasikan sumber daya publiknya untuk menciptakan barang dan jasa publik yang menguntungkan dalam ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas institusi-institusi yang lebih baik tersebut memastikan pemerintah yang lebih efektif untuk mendistribusikan sumber daya

publik secara lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Law and Habibullah, 2006).

2.5. Pengukuran Efisiensi Pengeluaran Publik pendekatan SFA

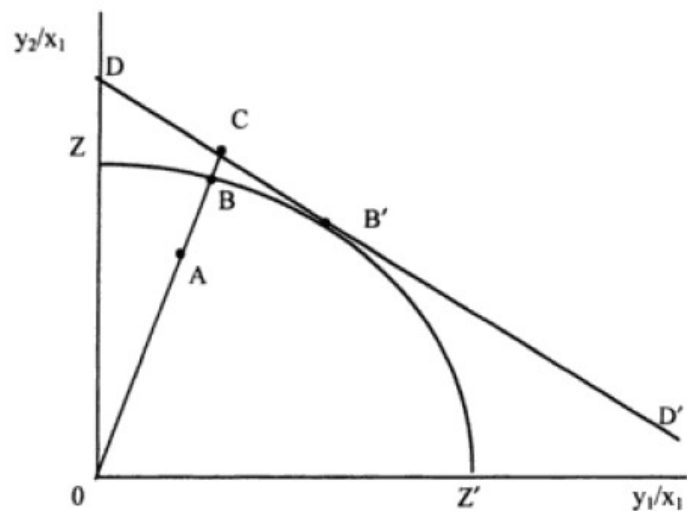
Teori yang dipakai dalam pengukuran efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengembangkan fungsi produksi. Asumsi yang dipakai adalah kegiatan penyelenggaraan pengeluaran publik dianggap sebagai sebuah perusahaan (firm). Efisiensi yang akan dieksplorasi pada penelitian adalah efisiensi yang bersifat relatif berdasarkan pada konsep dan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA).

Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output yang diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan output tersebut, dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu. Fungsi produksi menunjukkan unit total produk sebagai fungsi dari unit masukan (input) dengan kata lain fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi tersebut dikenal dengan istilah input dan jumlah produksi disebut sebagai output. Dalam menganalisis hubungan fungsional antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang dihasilkan dapat digunakan suatu model matematis yang disebut fungsi produksi (production function). Algifari (2011) menjelaskan bahwa fungsi produksi adalah model matematis yang menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan jumlah output yang akan dihasilkan.

Secara teoritis, efisiensi dapat dijelaskan melalui pendekatan fungsi produksi, yaitu misalkan fungsi produksi, $f(x)$, menjelaskan transformasi input menjadi output dan menggambarkan output maksimal yang dapat diperoleh dari berbagai vector input. Pada tingkat teknologi tertentu, produksi tersebut menggunakan n input, $x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$, yang dibeli pada harga tetap $w = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n) > 0$, untuk memproduksi input y .

Kemudian, suatu produksi melaksanakan kegiatannya berdasarkan rencana produksi, (y_0, x_0) . Rencana ini dikategorikan efisien secara teknis jika $y_0 = f(x_0)$, namun diklasifikasikan in-efisien secara teknis jika $y_0 < f(x_0)$. In-efisien teknis terutama disebabkan oleh penggunaan input berlebih, yang mengimplikasikan $w'x_0 = c(y_0, w)$. Dengan asumsi bahwa f dapat didiferensiasikan, rencana (y_0, x_0) dikategorikan efisien secara alokatif jika $f_i(x_0) / f_j(x_0) = w_i / w_j$, namun diklasifikasikan in-efisien secara alokatif jika $f_i(x_0) / f_j(x_0) \neq w_i / w_j$. Dalam kasus ini, biaya tidak dapat proporsi yang kuran tepat, sehingga $w'x_0 = c(y_0, w)$.

Misalkan suatu perusahaan menghasilkan dua jenis output (y_1 dan y_2) dengan menggunakan satu input (x). Jika jumlah input yang akan digunakan telah ditetapkan pada suatu level tertentu, maka kurva ZZ' pada gambar 2.2 menunjukkan kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve*), yaitu kurva batas atas produksi yang dapat dilakukan perusahaan. Titik A merupakan titik in-efisiensi karena tidak terletak pada ZZ' dan AB merupakan in-efisiensi secara teknis, dimana output masih bisa ditingkatkan tanpa adanya tambahan input. Sehingga perhitungan efisiensi teknis adalah rasio dari OA/OB .



Gambar 2.2 Efisiensi Berorientasi Output

Jika garis DD' merupakan *isorevenue*, yaitu garis yang menggambarkan kombinasi output yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tingkat pendapatan yang sama, maka efisiensi alokatif diperoleh melalui rasio OB/OC . Sehingga titik B dan titik B' menggambarkan efisiensi secara teknis karena terletak pada *isoquant* ZZ' tetapi hanya titik B' yang efisien secara alokatif karena terletak pada *isorevenue* DD' (Smith Peter C dan Street Andrew, 2006)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendasar pada dua (2) permasalahan besar yaitu *pertama*, apakah peningkatan belanja publik mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Indonesia. *Kedua* adalah apakah efisiensi pemerintah adalah sistem mempercepat untuk mendorong dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia, (2) bagaimana dampak efisiensi pemerintah mendorong efek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia.

3.2. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu ekonomi maupun bagi pengambil kebijakan, manfaat penelitian tersebut adalah

1. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman teori ekonomi tentang penerapan pengelolaan pengeluaran publik dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih khusus, kita melihat apakah sebetulnya pola pemikiran klasik masih dapat dipergunakan sebagai analisis efektifitas belanja pemerintah. Juga memberikan sumbangan tentang justifikasi teorinya klasik apakah masih relevan atau tidak.
2. Selanjutnya, Terkait penerapan metode pengukuran efisiensi dalam pengeluaran publik dengan pendekatan *Stochastic Frontier Analysis (SFA)*, diharapkan pula dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pemanfaatan pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan efisiensi mendorong pengeluaran public untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Secara praktis, jika pola pemerintahan masih dalam pola pemikiran klasik, maka intervensi kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan, perlu peningkatan efektifitas peran pemerintah. Kemudian, penelitian ini juga menjadi penting dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi pengeluaran

publik pemerintah daerah. Masukan yang dimaksud adalah dalam bentuk kontribusi kepada eksekutif dan legislatif untuk menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan harapan masyarakat terhadap pengelolaan pengeluaran public yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

4. Manfaat lainnya bagi peneliti selanjutnya adalah dapat melakukan penelitian dengan menggunakan konsep dan variabel-variabel lain yang belum bisa dilakukan pada penelitian ini.

BAB IV METODE PENELITIAN

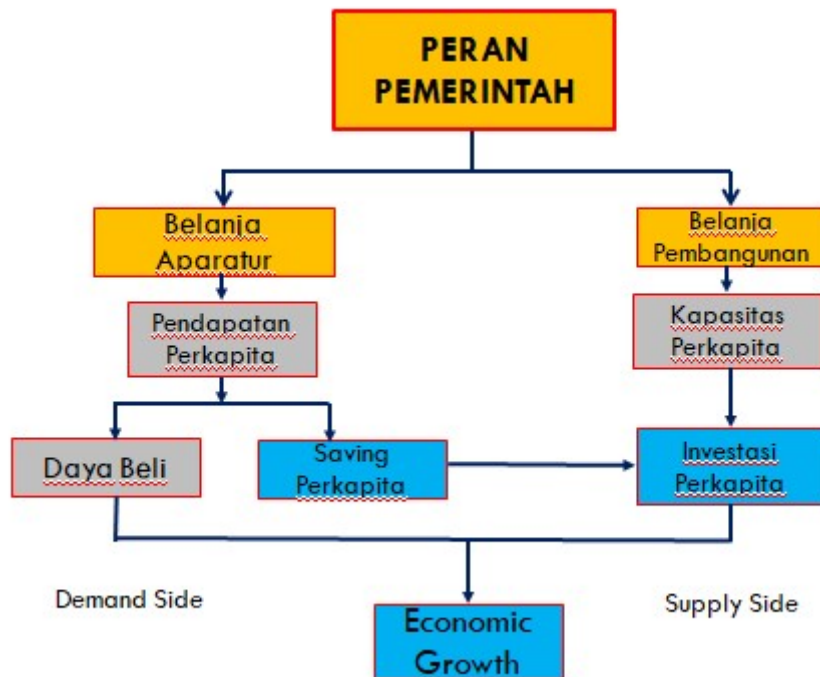
4.1. Tahapan-Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 tahapan utama untuk menyelesaikan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan identifikasi. Dalam tahap ini menguraikan fenomena permasalahan, kajian teori dan kajian empiris, setelah itu menentukan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, selanjutnya mengidentifikasi variabel penelitian dan model penelitian.
2. Tahap pengambilan data. Dalam tahap ini mengumpulkan data yakni data sekunder yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Pusat dan Daerah, juga data yang dipublikasikan DJPK di Kementerian Keuangan periode 2011-2016. Data sekunder tersebut meliputi, PDRB ADHK, PDRB ADHB, Jumlah Penduduk kabupaten kota, PMTB atau Gross Fixed Capital Formation, Inflasi, APBD, Anggaran Publik meliputi belanja pendidikan dan kesehatan, serta output dari anggaran public sebagai indicator kinerja.
3. Tahapan Pengolah dan analisis data. Dalam tahap ini melakukan pengolahan dan analisis data. Pertama, melakukan pemilihan model terbaik, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Setelah pemilihan model dilakukan, selanjutnya meregresikan model dengan menggunakan 2 model persamaan. Model 1 tentang model penelitian yang menjawab pertanyaan nomer (1) di Bab I, yaitu dampak pengeluaran public terhadap pertumbuhan ekonomi. Model 2 tentang model penelitian yang menjawab pertanyaan nomer (2) di Bab I, yaitu dampak efisiensi yang mendorong efek pengeluaran public untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian, untuk mengukur tingkat efisiensi dengan pendekatan SFA yang dijelaskan di sub bab 3, yaitu output atas penggunaan anggaran public, dimana output ini sebagai indicator kinerja.
4. Tahap analisis dan kesimpulan. Dalam tahap ini menjelaskan hasil analisis secara statistic yaitu dengan menggunakan Fixed Effect Model panel data, kemudian menarik kesimpulan.

4.2. Konsep Penelitian

Rancangan Penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar 4.1. berikut:



Gambar 4.1.
Konsep Penelitian

4.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ada 73 kabupaten/kota yang merupakan kabupaten / kota di dua provinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan periode pengamatan dari tahun 2011 hingga 2016. Provinsi tersebut dipilih berdasarkan: 1. Lokasi geografis, yaitu terletak di Pulau Jawa karena dekat dengan pusat pengeluaran dan pusat ekonomi. 2. Populasi, kedua provinsi mempunyai populasi terbesar dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa, digunakan sebagai kriteria dalam memilih provinsi. 3. Pertumbuhan Ekonomi; Provinsi terpilih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah setelah desentralisasi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum desentralisasi. Berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipilih sebagai objek dalam penelitian ini.

4.4. Sumber Data dan Deskripsi Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi data time series dan data cross section atau sering disebut sebagai data panel. Penelitian ini menggunakan

data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Otonom di Kementerian Keuangan (DJPK), dan sumber daya lain, seperti buku, jurnal dan artikel. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per kapita (y_{it}) untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan digunakan sebagai variabel dependen. Selanjutnya, dalam penelitian memasukkan variabel kontrol yang meliputi; Pembentukan Modal Tetap Bruto diukur sebagai persentase dari PDRB untuk menunjukkan persediaan modal fisik (k_{it}), tingkat pertumbuhan penduduk untuk menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja (l_{it}), inflasi (cpi_{it}) untuk menangkap efektivitas kebijakan moneter, pengeluaran publik dalam studi ini pengeluaran pendidikan dan kesehatan (g_{it}) diukur sebagai persentase PDRB dan efektivitas pemerintah (eff_{it}), yang digunakan sebagai proksi untuk efisiensi pemerintah dan digunakan sebagai istilah interaksi dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk mendapatkan ukuran efisiensi pemerintah, kami mengikuti metodologi (Kumbhakar & Lovell, 2000) sebagai pendekatan dalam mengukur efisiensi pemerintah. Dengan mengestimasi stochastic production frontier untuk sektor publik. Model stochastic frontier adalah dalam bentuk:

$$\ln y_i = \beta_0 + \beta_1 \ln x_i + v_i - u_i \quad (1)$$

Dimana y_i adalah ukuran output sektor publik di kabupaten atau kota i , dan kami menggunakan rata-rata indeks kinerja sektor publik sebagai ukuran y_i , kemudian x_i adalah ukuran dari input sektor publik, kami menggunakan total belanja publik (sebagai proporsi dari PDRB) yang tersedia dari Direktorat Jenderal Otonomi di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, u_i adalah komponen ketidakefisienan teknis nonnegatif atau error term, dan v_i adalah komponen gangguan yang diasumsikan terdistribusi secara normal dan terpisah dari u_i .

4.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi dari data deret waktu (time series) dan data cross section. Dalam metode data panel ada tiga metode yang digunakan yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Untuk mengetahui model mana yang terbaik dalam penelitian untuk menguji kesesuaian model. Jadi, untuk memperkirakan pemilihan model yang terbaik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Uji Chow:** Tes ini digunakan untuk memilih model yang sesuai antara common effect dan fixed effect. Hipotesis yang disusun adalah

Ho: Model efek umum

H1: Model efek tetap.

Langkah pertama adalah membuat regresi data panel dengan metode common effect dan kemudian dengan fixed effect. Hasil pengujian dapat dilihat, jika nilai probabilitas Chi-square atau nilai probabilitas F-test $< 0,05$ maka Ho ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect, dan sebaliknya.

2. **Hausman Test:** Tes ini digunakan untuk memilih model yang tepat antara fixed effect model dan random effect model. Hipotesis yang tersusun adalah

Ho: random effect model

H1: fixed effect model

Langkah pertama adalah membuat regresi data panel dengan fixed effect model dan kemudian random effect model. Hasil tes dapat dilihat, jika nilai probabilitas random effect model $< 0,05$ maka Ho ditolak, sehingga model yang tepat adalah fixed effect model, dan sebaliknya.

4.6. Spesifikasi Model

Penelitian ini menggunakan dua model yang berbeda untuk menguji dampak pengeluaran pemerintah (pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan) dan efisiensi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia. **Model satu** (1) adalah untuk menguji dampak pengeluaran publik (dalam hal ini pengeluaran dalam pendidikan dan kesehatan) dan variabel kontrol lainnya tanpa keterlibatan efisiensi pemerintah. **Model dua** (2) adalah menganalisis efek pengeluaran pemerintah dan variabel kontrol lainnya termasuk efisiensi pemerintah. Oleh karena itu, model dua ingin menguji kemampuan pemerintah untuk mengelola atau mengatur kebijakan yang sesuai dengan maksud pada distribusi sumber daya publik yang tepat dan dampaknya terhadap pertumbuhan. Kedua model digambarkan sebagai berikut;

4.6.1 Model Satu

$$y_{it} = \beta_0 + \sum_{i=1}^4 \beta_i X_{it} + \varepsilon \quad (2)$$

Di mana y_{it} menunjukkan pertumbuhan ekonomi. X adalah menunjukkan variabel kontrol seperti yang dibahas pada bagian (4.2) di atas yang merupakan physical capital stock (k_{it}), pertumbuhan angkatan kerja (l_{it}), tingkat inflasi (cpi_{it}) dan pengeluaran publik dalam studi ini adalah pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan (g_{it}).

Menganggap bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan variabel penjelasnya bersifat linier, penelitian ini menggunakan log natural dan mengimplementasikan model pertumbuhan dari persamaan (2) Sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln k_{it} + \beta_2 \ln l_{it} + \beta_3 \ln cpi_{it} + \beta_4 \ln g_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Dari persamaan (3) adalah pengeluaran publik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia sebagai berikut;

$$d \ln y_{it} = \beta_4 d \ln g_{it} \quad (4)$$

$$d \ln y_{it} / d \ln g_{it} = \beta_4 \quad (5)$$

Persamaan ini (5) menguji pengaruh pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia. Estimasi ini menjawab pertanyaan penelitian nomer stu (1) yang dinyatakan di Bab 1.

4.6.2 Model Dua

Untuk menguji efisiensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik, penelitian ini melibatkan efisiensi pemerintah dalam model pertumbuhan secara umum sebagai suatu istilah interaksi. Tujuannya adalah untuk menguji efisiensi pemerintah dalam mendorong efek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian efisiensi pemerintah berinteraksi dengan pengeluaran publik. Jadi, setelah mengaitkan pengeluaran publik dengan efisiensi pemerintah, penelitian ini menggunakan model dua sebagai berikut;

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^4 \alpha_i X_{it} + \alpha_5 g_{it} * eff_{it} + \varepsilon \quad (6)$$

Menganggap bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan variabel penjelasnya bersifat linier, penelitian ini menggunakan log natural dan melakukan model pertumbuhan dari persamaan (6) sebagai berikut;

$$\ln y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln k_{it} + \alpha_2 \ln l_{it} + \alpha_3 \ln cpi_{it} + \alpha_4 \ln g_{it} + \alpha_5 \ln g_{it} * eff_{it} + \epsilon \quad (7)$$

Kemudian dari persamaan (7) pentingnya efisiensi pemerintah dalam mendorong efek pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi diuji sebagai berikut;

$$d \ln y_{it} = (\alpha_4 + \alpha_5 eff_{it}) d \ln g_{it} \quad (8)$$

$$d \ln y_{it} / d \ln g_{it} = \alpha_4 + \alpha_5 eff_{it} \quad (9)$$

Persamaan (9) menyajikan pentingnya efisiensi pemerintah untuk mendorong efektivitas pengeluaran publik untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. So, itu menjawab pertanyaan penelitian nomer dua (2) yang dijelaskan di Bab I.

BAB V

HASIL YANG DICAPAI

Bagian bab ini dipaparkan tentang hasil yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan penelitian, yaitu menyajikan pembahasan dan interpretasi hasil pemilihan model dalam data panel melalui Chow Test dan Hausman Test. Bagian ini juga menjawab dua pertanyaan penelitian dengan metode OLS Fixed Effect Model data panel.

5.1. Pemilihan Model

Dalam data panel, ada tiga metode yang digunakan yaitu common effect model, fixed effect model dan random effect model. Untuk mengetahui model mana yang terbaik, maka perlu menguji model yang tepat, yaitu Uji Chow diterapkan untuk melihat apakah common effect atau fixed effect yang lebih baik;

1. **Uji Chow.** Tes ini digunakan untuk memilih model yang sesuai antara efek umum dan model efek tetap. Hipotesis yang disusun adalah

Ho: common effect model

H1: fixed effect model

Table 4.1. The result of Chow Test

Effect Test	Statistic	d. f.	Prob.
Cross-section F	378.652293	(72,361)	0.0000
Cross-section Chi-square	1899.851725	72	0.0000

Source: Secondary data (processed), 2018

Dari table (1) menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square atau nilai probabilitas uji-F adalah $0,0000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak, sehingga model yang tepat adalah model fixed effect.

2. **Hausman Test.** Tes ini digunakan untuk memilih model yang tepat antara model fixed effect dan model random effect. Hipotesis yang tersusun sebagai berikut:

Ho: Model fixed effect

H1: Model random effect

Table 4.2: The result of Hausman Test

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section random	378.652293	5	0.0000

Source: Secondary data (processed), 2018

Berdasarkan uji Hausman ditunjukkan p-value diperoleh Hausman test antara model fixed effect dan model random effect pada taraf signifikansi 5% yaitu pada 0,000. Karena p-value lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05) sehingga dapat diputuskan bahwa model fixed effect lebih tepat untuk menguji pertanyaan penelitian.

Berikut adalah kesimpulan dari hasil pemilihan dari pengujian model dalam penelitian:

Table 4.3: Conclusion Model Selection

	Prob.	Conclusion	
Chow Test	0.0000	Reject H_0	FEM better
Hausman Test	0.0000	Reject H_0	FEM better

Source: Secondary data (processed), 2018

5.2 Hasil Fixed Effect Model

Tabel 4.4. Hasil Fixed Effect Model untuk Model 1 dan Model 2

Variables	Model (1) tanpa efisiensi pemerintah		Model (2) dengan efisiensi pemerintah	
	Coefficient	Test Statistics	Coefficient	Test Statistics
C	3.329633	29.61934 (0.0000)	3.121559	30.72849 (0.0000)
LnI_{it}	-0.289461	-13.60934 (0.000)	-0.322939	-14.09260 (0.0000)
Ln k_{it}	-0.395612	-3.496925 (0.0005)	-0.249763	-2.018584 (0.0443)
LCPI_{it}	-0.001590	-1.039791 (0.29911)	-0.002109	-1.307364 (0.1920)
Lg	3.84e-08	7.122529 (0.0000)	0.003540	3.912049 (0.0001)
$\text{Lg}^* \text{eff}$			0.004031	1.895420 (0.0589)
Adjusted R-squared		0.989332		0.986905
F-statistic		440.5027		424.5461
Prob(F-statistic)		0.000000		0.000000
S.D. dependent var		0.631718		0.632438
Akaike info criterion		-2.271932		-2.252483
Schwarz criterion		-1.554282		-1.534019
Hannan-Quinn criter.		-1.988766		-1.967962
Durbin-Watson stat		1.251028		1.321685
Observation		438		438

Hasilnya pada Tabel 4 di atas menggambarkan sebagai berikut: Dalam model satu ketika efisiensi pemerintah tidak berinteraksi dalam model pertumbuhan, variabel pengeluaran publik secara statistik signifikan positif pada 1 persen tingkat signifikan. Namun, dalam model dua ketika efisiensi pemerintah berinteraksi dalam model pertumbuhan sebagai suatu istilah interkomunikasi, hasil menunjukkan istilah komunikatif tidak signifikan di semua level signifikansi. Variabel-variabel lain secara statistik signifikan pada 1 persen tingkat signifikan tetapi variabel CPI tidak signifikan secara statistik.

5.2.1 Dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi

Model satu (1) menunjukkan bahwa koefisien pengeluaran publik memiliki tanda positif dan signifikan seperti yang diharapkan oleh penelitian ini. Hasilnya menyatakan bahwa 1 persen peningkatan belanja publik ke kabupaten dan kota di Jawa Indonesia mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,84 per sen. Temuan efek positif antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi konsisten dengan (Govindaraju, Rao and Anwar, 2011), (Yahya *et al.*, 2012), (Sirag *et al.*, 2016) yang menyimpulkan bahwa meningkatkan pengeluaran publik mempercepat pertumbuhan ekonomi di Malaysia; (Qi, 2016), (Zhang and Zou, 1998), (Chen, 2010) yang menemukan bahwa peningkatan belanja publik mempercepat pertumbuhan ekonomi Tiongkok; (Ogundipe and Oluwatobi, 2013), (Patricia and Izuchukwu, 2013), (Okoro, 2013), (Ebong *et al.*, 2016b) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran publik pada belanja modal dan pengeluaran rutin mendorong pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

5.2.2. Dampak efisiensi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi

Signifikansi efisiensi pemerintah ditunjukkan oleh koefisien interkomunikasi, yaitu ketika pengeluaran publik dikomunikasikan dengan efisiensi pemerintah. Nilai koefisien komunikatif memiliki dampak positif seperti yang diduga oleh penelitian ini meskipun secara statistik tidak signifikan. Koefisien positif ini mengartikan bahwa pengeluaran publik dan efisiensi pemerintah adalah nilai penyeimbang yang mereka lakukan secara bersamaan untuk memuluskan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa 1 persen peningkatan belanja publik yang berinteraksi dengan efisiensi pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004 per sen. Berdasarkan temuan ini, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Indonesia telah gagal untuk mempengaruhi distribusi pengeluaran publik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan (James Guseh, 2000), (Yabbar *et al.*, 2014) menyatakan bahwa peningkatan tingkat efisiensi di sektor publik tidak selalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

5.2.3. Dampak variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi

Dalam paper ini, penjelasan variabel kontrol diterapkan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori neo klasik bahwa $Y=f(K, H, AL)$ dimana Y sebagai output yang dapat diterjemahkan sebagai pertumbuhan ekonomi, K merupakan modal fisik, H adalah human capital, L adalah labor dan A merupakan besar kecilnya teknologi atau kemampuan setiap penduduk. A.L adalah

potensial kemampuan penduduk (Olsson, 2010). Secara statistik, dampak dari variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia sebagai berikut:

Variabel tenaga kerja yang menunjukkan tingkat pertumbuhan populasi. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa koefisien labor rate telah mendukung teori pertumbuhan neoclassic (Olsson, 2010). Baik dalam model satu (1) maupun model dua (2). Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1 persen laju pertumbuhan penduduk dapat memperlambat 10 persen pertumbuhan ekonomi, hasil konsisten efek jumlah penduduk yang tinggi memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti (Fact, 2009), (Klasen Stepen. Lawson David, 2007) dan (Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences, 2014). Secara teoritis, dalam model pertumbuhan neo-klasik yang dikembangkan oleh Solow membedakan antara efek steady state dan efek transisi. Dalam kondisi mapan, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengurangi pendapatan per kapita, tetapi tidak berdampak pada pertumbuhan pendapatan per kapita. Akibatnya, dalam steady state pertumbuhan per kapita tidak terkait dengan pertumbuhan penduduk. Tetapi dalam transisi ke kondisi mapan, pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi per kapita.

Variabel capital menunjukkan gross fixed capital formation. Berdasarkan hasil statistik, ada hubungan negatif antara stok modal dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 1 persen dari stok modal fisik melambat 0,39 persen pada pertumbuhan ekonomi ketika efisiensi pemerintah saling terkait dalam model pertumbuhan dan 0,25 per sen ketika efisiensi pemerintah tidak saling terkait dalam model pertumbuhan. Namun, ketika efisiensi pemerintah terlibat dalam model growth, koefisien stok modal juga negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam persediaan modal fisik memperlambat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa di Indonesia sebesar 29 per sen ketika efisiensi pemerintah dimasukkan dalam model pertumbuhan. hasil konsisten dengan (Onyinye, Idenyi and Ifeyinwa, 2017), (Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences, 2014). Selanjutnya, dalam semua model menunjukkan bahwa koefisien inflasi memiliki tanda negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen inflasi dapat memperlambat 0,02 per sen ketika efisiensi pemerintah dimasukkan dalam model pertumbuhan dan 0,01 per sen ketika efisiensi pemerintah tidak termasuk dalam model pertumbuhan. hasil konsisten dengan penelitiannya (Kasid and MWAKANEMELA, 2013), (W. Madurapperuma, 2016)

BAB VI
RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Penelitian telah dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah menyelesaikan beberapa sub pembahasan yaitu pendahuluan terkait fenomena, permasalahan, kajian teoritis, kajian empiris, pengumpulan data sekunder yang terkait dengan pengeluaran publik, data sekunder output dari anggaran publik, dan beberapa data sekunder yang diperuntukkan untuk variabel kontrol dalam model penelitian. Beberapa capaian yang menjadi target penelitian sebagian sudah dilakukan, yaitu 1). Submit jurnal internasional bereputasi yaitu Journal of Applied Economic Science ISSN: 18436110 H Index 7 dengan Q3 coverage on going. Publisher: ASERS Publishing, Rumania Country. 2) Submit jurnal nasional terakreditasi, yaitu akan terbit di Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Vol 4 (1) Maret 2019. 3). Proceeding Internasional, yang sudah dilakukan di Universitas Jember (ICEBAST). Selanjutnya, Rincian kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan tahap berikutnya meliputi:

Tabel 6.1.
Rencana Tahapan Kegiatan Penelitian selanjutnya

No,	Jenis Kegiatan	Tahun (2017/2018)							Ket.
		April	May	June	July	August	Sept	Oct	
1	Submit Jurnal Internasional							√	Sudah submit
2	Jurnal Nasional Terakreditasi						√		Sudah diterima, terbit Vol (4) 1 Maret 2019
3	International Conference								Sudah dilakukan
4	HKI							√	Sudah Mengajukan

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Indonesia memberikan keuntungan berlimpah. Berdasarkan hasil empiris dari penelitian ini, belanja publik mempercepat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Indonesia. Sedangkan efisiensi pemerintah tidak membuktikan adanya bukti untuk mempercepat dampak pengeluaran publik terhadap pertumbuhan di kabupaten/kota. Jadi, efisiensi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Indonesia adalah tidak efektif pada pendistribusian pengeluaran publik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Indonesia telah menunjukkan ketidaksempurnaan terkait manajemen dan pelaksanaan kebijakan terhadap distribusi pengeluaran publik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

7.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian mengusulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Jawa, Indonesia harus memperluas sektor publik sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berkembangnya sektor publik termasuk sesuatu yang dapat memperbesar pengeluaran pemerintah. Meskipun pengeluaran publik meningkat, pembuat keputusan, dalam hal ini pembuat kebijakan harus mempertimbangkan lebih banyak faktor lain yang penting untuk mempertahankan dampak positif antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota.

Pertama, belanja publik harus memiliki perencanaan pengeluaran yang baik; melakukan evaluasi berkala untuk menetapkan standar layanan minimum; meningkatkan transparansi dalam pengadaan sektor publik; dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam belanja publik. Hal ini dimaksudkan agar belanja publik dapat menggunakan anggaran untuk menghasilkan layanan yang lebih baik, terutama layanan yang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Layanan produktif seperti layanan di sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur. *Kedua*, belanja publik harus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat

meningkatkan produktivitas dan output, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, hindari beberapa kemungkinan distorsi ketika perpajakan digunakan untuk memobilisasi pendapatan pemerintah sehingga dapat melindungi keberlanjutan sektor swasta. Kemudian, tempatkan beberapa penciptaan untuk meningkatkan tingkat pengeluaran masyarakat dalam investasi publik dengan mengurangi impor mereka ketika mereka mendanai proyek publik.

Selain itu, kami berharap bahwa efisiensi pemerintah harus menjadi titik yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi melalui belanja publik; namun hasil empiris dari penelitian ini tidak berhasil untuk memverifikasi hipotesis. Bahkan hubungan antara efisiensi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi positif, namun pengaruhnya terhadap pertumbuhan tidak signifikan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Indonesia harus memperbarui atau memperbaiki lembaga yang menargetkan menjadi lebih baik dalam mengelola dan menerapkan kebijakan yang memiliki dampak signifikan langsung terhadap pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afonso, A., Schuknecht, L. and Tanzi, V. (2008) *Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency, Working Paper Series*. doi: 10.1007/s10888-010-9138-z.
- [2] Ahmad, R. and Othman, N. (2014) 'Optimal Size of Government and Economic Growth in Malaysia: Empirical Evidence', in *Urus Tadbir Ekonomi Yang Adil* (ed.) *Prosiding PERKEM ke-9*. Kuala Terengganu, pp. 41–48.
- [3] Al-Fawwaz, T. M. (2016) 'The Impact of Public Functional Expenditures on Economic Growth in Jordan during the Period (1993-2013)', *Public Policy and Administration ReviewOnline* *Public Policy and Administration Review*, 2(22), pp. 149–169. doi: 10.5539/ijef.v6n10p157.
- [4] Angelopoulos, K. (2008) *Does public sector efficiency matter ? Revisiting the relation between fiscal size and economic growth in a world sample*.
- [5] Angelopoulos, K., Philippopoulos, A. and Tsionas, E. (2008) 'Does public sector efficiency matter? Revisiting the relation between fiscal size and economic growth in a world sample', *Public Choice*, 137(1–2), pp. 245–278. doi: 10.1007/s11127-008-9324-8.
- [6] Butkiewicz, J. L. (2011) 'Institutions and the Impact of Government Spending on Growth', *Journal of Applied Economics*. Universidad del CEMA, 14(2), pp. 319–341. doi: 10.1016/S1514-0326(11)60017-2.
- [7] Chang, H. C., Huang, B. N. and Yang, C. W. (2011) 'Military expenditure and economic growth across different groups: A dynamic panel Granger-causality approach', *Economic Modelling*. Elsevier B.V., 28(6), pp. 2416–2423. doi: 10.1016/j.econmod.2011.06.001.
- [8] Chen, Z. (2010) 'Government Expenditure and Economic Growth in China', in *International Conference on Computer Application and System Modeling*, pp. V13-57-V14-61. doi: 10.1007/s10310-008-0078-4.
- [9] Chipaumire, G. *et al.* (2014) 'The Impact of Government Spending on Economic Growth: Case South Africa', *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(1), pp. 109–118. doi: 10.5901/mjss.2014.v5n1p109.
- [10] Connolly, M. and Li, C. (2016) 'Government spending and economic growth in the OECD countries', *Journal of Economic Policy Reform*, (September). doi: 10.1080/17487870.2016.1213168.
- [11] Corsetti, G. (2013) 'The Composition of Government Spending and Economic Growth in Developing Countries: The Case of Latin America', *International Journal of Sustainable Development*, 05(02), pp. 11–20.
- [12] Dada, M. A. (2017) 'Modelling the Behaviour of Government Spending and Economic Growth in Six ECO-WAS Countries (1981-2013)', *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 5(1), pp. 34–56. doi: 10.11648/j.ijefm.20170501.14.
- [13] Danu Prasetyo, A. and Zuhdi, U. (2013) 'The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development', *Procedia Economics and Finance*. Elsevier B.V., 5(2012), pp. 615–622. doi: 10.1016/S2212-5671(13)00072-5.
- [14] Dudzeviit, G., Liuvaitien, A. and Simelyt, A. (2018) 'Government expenditure and economic growth in the European union countries', *International Journal of Social Economics*, 36(36), pp. 127–133.
- [15] Ebong, F. *et al.* (2016a) 'Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria : A Disaggregated Analysis', 3(1), pp. 113–121. doi: 10.20448/journal.501/2016.3.1/501.1.113.121.
- [16] Ebong, F. *et al.* (2016b) 'Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Analysis', *Asian Journal of Economics and Empirical Research*, 3(1), pp. 113–121. doi: 10.20448/journal.501/2016.3.1/501.1.113.121.
- [17] Embaye, J. A. A. (2011) *Explaining the Growth of Government Spending in South Africa*. South of Africa.
- [18] Emmanuel Nkoa Onggo, A. W. V. and Sciences, M. (2014) 'Does gross capital formation

- matter for economic growth in the CEMAC sub-region?', *Euro Economica*, 2(2).
- [19] Fact, S. (2009) 'The Effect of Population Growth on Economic Growth : A Meta-Regression Analysis of the Macroeconomic Literature', *Population and Development Review*, 35(June), pp. 221–248.
- [20] Gisore, N. *et al.* (2014) 'Effect of Government Expenditure on Economic Growth in East Africa: A disaggregated Model', 3(8), pp. 289–304.
- [21] Govindaraju, V. G. R. C., Rao, R. and Anwar, S. (2011) 'Economic growth and government spending in Malaysia: A re-examination of Wagner and Keynesian views', *Economic Change and Restructuring*, 44(3), pp. 203–219. doi: 10.1007/s10644-010-9099-z.
- [22] Hasnul, A. G. (2015) 'The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia', (71254), pp. 0–15.
- [23] Hauner, D. and Fund, I. M. (2008) 'Explaining Differences in Public Sector Efficiency : Evidence from Russia ' s Regions', *World Development*. Elsevier Ltd, 36(10), pp. 1745–1765. doi: 10.1016/j.worlddev.2007.09.011.
- [24] Hauner, D. and Kyobe, A. (2010) 'Determinants of government efficiency', *World Development*, 38(11), pp. 1527–1542. doi: 10.1016/j.worlddev.2010.04.004.
- [25] Hodgson, G. M. (2016) 'Institutions , Recessions and Recovery in the Transitional Economies', 3624(March). doi: 10.1080/00213624.2006.11506965.
- [26] Hua, Y. (2016) *The Relationship Between Public Expenditure on Education and Economic Growth: Evidence from China*. Clemson University. Available at: http://tigerprints.clemson.edu/all_theses/2361/.
- [27] Idenyi, O. S., Ogonna, I. C. and Chinyere, U. C. (2016) 'Public Expenditure and Economic Growth in South Africa : Long Run and Causality Approach', *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 1(2), pp. 1–17. doi: 10.9734/AJEBA/2016/29677.
- [28] Inverno, G. D., Carosi, L. and Ravagli, L. (2017) 'Socio-Economic Planning Sciences Global public spending ef fi ciency in Tuscan municipalities', *Socio-Economic Planning Sciences*. Elsevier Ltd, pp. 1–12. doi: 10.1016/j.seps.2017.01.006.
- [29] James Guseh (2000) 'Government size and Economic Growth : The Case of Liberia', *African Social Science Rvwiew*, 1(1), pp. 1–10.
- [30] Kaakunga, E. (2006) 'The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in Namibia', *Bank of Namibia*, 9(April), pp. 1–85.
- [31] Kasid, F. and MWAKANEMELA, K. (2013) 'Impact of Inflation on Economic Growth: a Case Study of Tanzania', *Asian Journal of Empirical Research*, 3(4), pp. 363–380.
- [32] Khusaini, M. (2016) 'The role of public sector expenditure on local economic development', *Inter. J. Economic Policy in Emerging Economies*, 9(2), pp. 5–7.
- [33] Kimaro, E. L., Choong, C.-K. and Sea, L. L. (2017) 'Government Expenditure, Efficiency and Economic Growth: A Panel Analysis of Sub Saharan African Low Income Countries', *African Journal of Economic Review*, V(II), pp. 34–54.
- [34] Kollias, C., Manolas, G. and Paleologou, S. M. (2004) 'Defence expenditure and economic growth in the European Union. A causality analysis', *Journal of Policy Modeling*, 26(5), pp. 553–569. doi: 10.1016/j.jpolmod.2004.03.013.
- [35] Law, S. H. and Habibullah, M. S. (2006) 'Financial Development, Institutional Quality and Economic Performance in East ASEAN Economies', 2(2), pp. 201–216.
- [36] Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi (2014) 'The effect of government expenditures on Indonesia economic growth', *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(1), p. 1. doi: 10.14414/jebav.v18i1.377.
- [37] Mandl, U., Dierx, A. and Ilzkovitz, F. (2008) *The effectiveness and efficiency of public spending*, *Economic Papers EU*. doi: 10.2765/22776.
- [38] Minh Quang Dao (2012) 'Government expenditure and growth in developing countries', *Progress in Development Studies*, 12(1), pp. 77–82. doi: 10.1177/146499341101200105.
- [39] Morozumi, A. and Veiga, F. J. (2016) 'Public spending and growth: The role of government accountability', *European Economic Review*. Elsevier, 89, pp. 148–171. doi: 10.1016/j.euroecorev.2016.07.001.

- [40] Niloy Bose, M Emranul Haque and Denise R Osbon (2003) 'Public Expenditure and Economic Growth : A Disaggregated Analysis for Developing Countries', pp. 1–24.
- [41] Ogundipe, A. A. and Oluwatobi, S. (2013) 'Government Spending and Economic Growth in Nigeria: Evidence from disaggregated Analysis', *Journal of Business Management and Applied Economics*, 2(4), pp. 1–10.
- [42] Okoro, A. S. (2013) 'Government spending and economic growth in Nigeria (1980-2011)', *Global Journal of Management and Business Research Economics and Commerce*, 13(5), pp. 83–94. doi: 10.1080/00036849400000064.
- [43] Oladele, M. F., Mah, G. and Mongale, I. (2017) 'The Role of Government Spending on Economic Growth in a Developing Country', *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions*, 7(2), pp. 140–146. doi: 10.22495/rgcv7i2c1p2.
- [44] Olsson, O. (2010) *Essentials of Advanced Macroeconomic Theory*. Cambridge, Massachusetts.
- [45] Onuorah, A.C., & A. (2012) 'Empirical Analysis of Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria', *Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(11), pp. 46–59.
- [46] Onyinye, N. G., Idenyi, O. S. and Ifeyinwa, A. C. (2017) 'Effect of Capital Formation on Economic Growth in Nigeria', 5(1), pp. 1–16. doi: 10.9734/AJEBA/2017/36075.
- [47] Patricia, N. and Izuchukwu, D. (2013) 'Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria', 1(4), pp. 64–71.
- [48] Qi, J. (2016) 'Government Education Expenditure, Third-party Spillover Effect and Economic Growth in China', *Journal of Sustainable Development*, 9(2), p. 145. doi: 10.5539/jsd.v9n2p145.
- [49] Radaelli, Francesco (2010) *Better Regulation for Growth*, The World Bank Group, Washington DC. The World Bank Group. Available at: www.worldbank.org.
- [50] Rahmayanti, Y. and Horn, T. (2011) 'Expenditure Efficiency and the Optimal Size of Government in Developing Countries', *Global Economy and Finance Journal*, 4(2), pp. 46–59.
- [51] Rashid Mohamed, M., Singh Jit Singh, K. and Liew, C.-Y. (2013) 'Impact of Foreign Direct Investment & Domestic Investment on Economic Growth of Malaysia', *21 Malaysian Journal of Economic Studies Impact of Foreign Direct Investment & Domestic Investment on Economic Growth of Malaysia Malaysian Journal of Economic Studies*, 50(501), pp. 21–35. doi: 10.6007/IJARBSS/v4-i8/1092.
- [52] Rasiah, R. (2011) 'The Role of Institutions and Linkages in Learning and Innovation', *International Journal of Institution and Economics*, 3(2), pp. 165–172.
- [53] Riedl, B. (2008) 'Why Government Spending Does Not Stimulate Economic Growth', *The Heritage Foundation*, p. 4999 (2208).
- [54] Shen, W. *et al.* (2015) *Government Spending Effects in Low-income Countries*.
- [55] Sinha, D. (1998) 'Government expenditure and economic growth in China', *Computer Application and System Modeling (ICCSM)*, 2010 International Conference on, 13(2), pp. 71–80. doi: 10.1109/ICCSM.2010.5622654.
- [56] Sirag, A. *et al.* (2016) 'Public health spending and GDP per capita in Malaysia: Does the Lucas critique apply?', *Malaysian Journal of Economic Studies*, 53(2), pp. 211–226.
- [57] Szarowská, I. (2011) 'Relationship between government spending and economic growth in the Czech Republic', *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 59(7), pp. 415–422.
- [58] W. Madurapperuma, M. (2016) 'Impact of Inflation on Economic Growth in Sri Lanka', *Journal of World Economic Research*, 5(1), p. 1. doi: 10.11648/j.jwer.20160501.11.
- [59] Wanjuu, L. and le Roux, P. (2017) 'Economic institutions and economic growth : Empirical evidence from the Economic Community of West African States', *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 20(1), pp. 1–10. doi: <https://doi.org/10.4102/sajems.v20i1.1607>.
- [60] Yabbar, R. *et al.* (2014) 'The impact of local government expenditure efficiency oneconomic and poverty growth of East Java Province (A Study on Educational Expenditure, Health and Infrastructure)', *World Applied Sciences Journal*, 30(30 A), pp. 121–130. doi:

10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.18.

- [61] Yahya, M. *et al.* (2012) 'Education Expenditure and Economic Growth: A Causal Analysis for Malaysia', *Issn*, 3(7), pp. 2222–1700. Available at: www.iiste.org.
- [62] Zhang, T. and Zou, H. (1998) 'Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China', *Journal of Public Economics*, 67(2), pp. 221–240. doi: 10.1016/S0047-2727(97)00057-1.